

# **PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

# **LAPORAN KEUANGAN**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

Jl. Majapahit No.58

Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074

e-mail : [helpdeskpta.mataram@gmail.com](mailto:helpdeskpta.mataram@gmail.com)



# **LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**

**Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2020**

**BAGIAN ANGGARAN 005.01**

**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

**Jl. Majapahit No.58**

**Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074**

**Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126**

**e-mail : [helpdeskpta.mataram@gmail.com](mailto:helpdeskpta.mataram@gmail.com)**

# *KATA PENGANTAR*

# Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/ Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Mataram, 20 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
  
MISMUDIN, S.H., M.H.  
NIP.1964.12311994031046

# *DAFTAR ISI*

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab .....	iii
Ringkasan.....	1
I. Laporan Realisasi Anggaran .....	4
II. Neraca.....	6
III. Laporan Operasional.....	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas .....	12
V. Catatan atas Laporan Keuangan .....	14
A. Penjelasan Umum .....	14
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran .....	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca.....	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional.....	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Ekuitas .....	36
F. Pengungkapan Penting Lainnya .....	44
Daftar dan Lampiran .....	46
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap .....	47
Daftar Hibah Langsung.....	50
Daftar Hibah Langsung.....	52

# *PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB*

## Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Jl. Majapahit No.58 Mataram - Nusa Tenggara Barat 83126

Telp. 0370-621876 Fax. 0370- 642074 e-mail : helpdeskpta.mataram@gmail.com

### Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mataram, 20 Juli 2020  
Kuasa Pengguna Anggaran,  
Sekretaris,  
MISNU DIN, S.H., M.H.  
NIP. 196412311994031046





# *RINGKASAN*

# Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

## 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp2.511.822 atau mencapai 24 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp10.500.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2020 adalah sebesar Rp6.653.744.743 atau mencapai 33 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp20.059.467.000.

## 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2020 dan 2019. Nilai Aset per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp45.813.733.050, yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp97.425.100; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp45.716.307.950; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp50.000.000 dan Rp45.813.733.050.

## 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp3.383.489, sedangkan jumlah beban

adalah sebesar Rp6.982.591.471, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp(6.979.207.982). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing defisit sebesar Rp161.900 dan Rp0, sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar Rp(6.979.369.882).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2020 adalah sebesar Rp46.091.870.011 dikurangi defisit-LO sebesar Rp(6.979.369.882), kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp6.651.232.921, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2020 adalah senilai 45.763.733.050.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

# *I. LRA PERBANDINGAN*

# I. Laporan Realisasi Anggaran

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020 dan 2019**  
*( dalam satuan Rupiah )*

	Uraian	Catatan	TA 2020			TA 2019
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>B.1</b>				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	10.500.000	2.511.822	24	3.941.070
	<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah</b>		<b>10.500.000</b>	<b>2.511.822</b>	<b>24</b>	<b>3.941.070</b>
<b>B.</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>B.2</b>				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	15.856.715.000	4.628.742.904	29	6.647.308.062
2.	Belanja Barang	B.2.2.	4.177.752.000	2.025.001.839	48	1.126.435.020
3.	Belanja Modal	B.2.3.	25.000.000	0	0	37.405.500
	<b>Jumlah Belanja Negara</b>		<b>20.059.467.000</b>	<b>6.653.744.743</b>	<b>33</b>	<b>7.811.148.582</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## *II. NERACA PERBANDINGAN*

## II. Neraca

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
**NERACA**  
**PER 30 Juni 2020 dan 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	31 Desember 2019
<b>ASET</b>			
<b>Aset Lancar</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	50.000.000	4.027.000
Piutang Bukan Pajak	C. 2.	0	0
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak	C. 3.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 4.	0	0
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C. 5.	0	0
Persediaan	C. 6.	47.425.100	23.949.000
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>97.425.100</b>	<b>27.976.000</b>
<b>Aset Tetap</b>			
Tanah	C. 7.	38.614.442.000	38.614.442.000
Peralatan dan Mesin	C. 8.	4.920.062.840	4.920.062.840
Gedung dan Bangunan	C. 9.	7.676.515.000	7.676.515.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 10.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C. 11.	127.598.485	127.598.485
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 12.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 13.	-5.622.310.375	-5.252.347.290
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>45.716.307.950</b>	<b>46.086.271.035</b>
<b>Aset Lainnya</b>			
Aset Tak Berwujud	C. 14.	121.003.000	121.003.000
Aset Lain-Lain	C. 15.	238.710.637	238.710.637
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 16.	-359.713.637	-359.713.637

Jumlah Aset Lainnya		0	0
<b>Jumlah Aset</b>		<b>45.813.733.050</b>	<b>46.114.247.035</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>			
Uang Muka dari KPPN	C. 17.	50.000.000	4.027.000
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 18.	0	17.478.357
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 19.	0	871.667
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>50.000.000</b>	<b>22.377.024</b>
<b>Jumlah Kewajiban</b>		<b>50.000.000</b>	<b>22.105.704</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C. 20.	45.763.733.050	46.091.870.011
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>45.763.733.050</b>	<b>46.091.870.011</b>
<b>Jumlah Kewajiban dan Ekuitas</b>		<b>45.813.733.050</b>	<b>46.114.247.035</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*





### *III. LAPORAN OPERASIONAL*

## III. Laporan Operasional

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**PER 30 Juni 2020 dan 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	30 Juni 2020	30 Juni 2019
<b>Kegiatan Operasional</b>			
<b>Pendapatan</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	5.858.587	5.858.587
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>5.858.587</b>	<b>5.858.587</b>
<b>Beban</b>			
Beban Pegawai	D. 2	4.626.540.890	6.645.378.606
Beban Persediaan	D. 3	29.009.500	29.525.000
Beban Barang dan Jasa	D. 4	1.258.906.780	418.996.424
Beban Pemeliharaan	D. 5	510.068.788	275.442.425
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	188.102.428	386.303.240
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	369.963.085	362.047.234
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
<b>Jumlah Beban</b>		<b>6.982.591.471</b>	<b>8.117.692.929</b>
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional</b>		<b>(6.979.207.982)</b>	<b>(8.111.834.342)</b>
<b>Kegiatan Non Operasional</b>			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		318.000	(8.000)
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		156.100	12.650
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>		<b>(161.900)</b>	<b>4.650</b>

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(6.979.369.882)	(8.111.829.692)
<b>Pos Luar Biasa</b>	<b>D. 13</b>	
Beban Luar Biasa	0	0
<b>Surplus (Defisit) Laporan Operasional</b>	<b>(6.979.369.882)</b>	<b>(8.111.829.692)</b>

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

## *IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS*

## IV. Laporan Perubahan Ekuitas

**PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**PER 30 Juni 2020 dan 2019**  
*(dalam satuan Rupiah)*

URAIAN	Catatan	2020	2019
Ekuitas Awal	E. 1	46.091.870.011	46.900.232.791
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(6.979.369.882))	(8.111.829.692)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3	0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.1	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.2	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.3	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.4	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 3.5	0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	6.651.232.921	7.807.207.512
Ekuitas Akhir		45.763.733.050	46.595.610.611

*\*Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

# V. *CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN*

## V. Catatan atas Laporan Keuangan

---

### A. Penjelasan Umum

---

#### A.1. Dasar Hukum

---

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada

Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

## A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Pengadilan Tinggi Agama Mataram mempunyai visi "Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Mataram Yang Agung". Adapun penjelasan atas visi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pengadilan Tinggi Agama menunjukkan institusi yang berada dalam lembaga Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Agama khususnya;
- b. Mataram, menunjukkan lokasi keberadaan Pengadilan Tinggi Agama;
- c. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, dan keluhuran.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

- 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi



2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Tinggi Agama Mataram melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya profesionalisme aparatur pengadilan.
2. Melanjutkan cita-cita modernisasi pengadilan.
3. Meningkatnya Proses penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, dan biaya ringan.
4. Tertib administrasi perkara.
5. Mudahnya aksesibilitas masyarakat terhadap pengadilan.
6. Pengawasan internal yang efektif dan efisien.
7. Putusan/penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan eksekutebel.
8. Pelaksanaan putusan/penetapan (eksekutebel) dan penyelesaian yang memberikan pengayoman kepada masyarakat.

### A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN

adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

#### A.4. Basis Akuntansi

---

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

#### A.5. Dasar Pengukuran

---

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### A.6. Kebijakan Akuntansi

---

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah sebagai berikut:

### **(1.) Pendapatan LRA**

---

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(2.) Pendapatan LO**

---

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### **(3.) Belanja**

---

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi

pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (4.) Beban

---

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

#### (5.) Aset

---

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

##### a. Aset Lancar

---

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang

menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

#### b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
  - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

### c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu

dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

#### d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

#### e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan

Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

#### Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

#### (6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
  - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
  - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - (4.) Kewajiban Jangka Panjang



(5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

#### **(7.) Ekuitas**

---

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

### B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi  
Pendapatan  
Negara  
dan Hibah :  
Rp2.511.822

2

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp2.511.822 atau mencapai 23,92 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp10.500.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 1 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	10.500.000	2.511.822	23,92
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	0	0,00
Total Pendapatan		10.500.000	2.511.822	23,92

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Semester I TA 2020 mengalami penurunan sebesar Rp(1.429.248) atau -36,27 persen dibandingkan TA 2019. Hal ini disebabkan karena adanya penurunan Pendapatan Sewa Gedung dalam hal ini sewa rumah dinas. Saat ini Hakim Tinggi mendapat fasilitas rumah hakim yang dibebankan pada DIPA sehingga tidak dipungut sewa pada Hakim Tinggi yang bersangkutan.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2020 dan 2019 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2020 dan 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.511.822	3.940.920	(1.429.098)	-36,26
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	150	(150)	-100,00
Total Pendapatan		2.511.822	3.941.070	(1.429.248)	-36,27

### B.2. Belanja

Realisasi  
Belanja  
Negara :  
Rp  
6.653.744.743

3

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 Juni TA 2020 adalah sebesar Rp6.653.744.743 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 33%

dari anggaran senilai Rp20.059.467.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni Tahun Anggaran 2020		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	15.856.715.000	4.628.743.790	29,19
Belanja Barang	4.177.752.000	2.034.721.839	48,70
Belanja Modal	25.000.000	0	0,00
<b>Total Belanja Bruto</b>	<b>20.059.467.000</b>	<b>6.663.465.629</b>	<b>33,22</b>
Pengembalian Belanja	0	-9.720.886	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>20.059.467.000</b>	<b>6.653.744.743</b>	<b>33,17</b>

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp(1.157.403.839) atau sebesar (14,82) persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena:

1. Penurunan aktivitas belanja pegawai, dimana belum ada Hakim Tinggi yang mutasi ke PTA Mataram sesuai TPM.
2. Belum ada realisasi belanja modal.

Perbandingan realisasi belanja TA 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2019 dan TA 2017  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	4.628.742.904	6.647.308.062	-2.018.565.158	-30,37
Belanja Barang	2.025.001.839	1.126.435.020	898.566.819	79,77
Belanja Modal	0	37.405.500	-37.405.500	-100,00
<b>Total Belanja</b>	<b>6.653.744.743</b>	<b>7.811.148.582</b>	<b>-1.157.403.839</b>	<b>-14,82</b>

### B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi  
Belanja  
Pegawai :  
Rp  
4.628.742.904

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp4.628.742.904 dan Rp.6.647.308.062.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 mengalami penurunan sebesar -30,37 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2019. Hal ini disebabkan antara lain karena banyak pegawai yang berkurang karena mutasi khususnya Hakim Tinggi dan belum ada pengganti Hakim Tinggi yang mutasi masuk hingga periode Semester I. Dengan berkurangnya pegawai, maka belanja gaji pokok PNS, Tunjangan Beras, dan Tunjangan Kemahalan juga menurun.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 4 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.401.331.960	1.655.394.180	(254.062.220)	-15,35
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.923	26.302	(8.379)	-31,86
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	119.261.160	140.568.400	(21.307.240)	-15,16
Beban Tunj. Anak PNS	32.907.608	32.899.070	8.538	0,03
Beban Tunj. Struktural PNS	44.910.000	46.935.000	(2.025.000)	-4,31
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.261.650.000	3.631.330.000	(1.369.680.000)	-37,72
Beban Tunj. PPH PNS	418.605.239	729.976.516	(311.371.277)	-42,65
Beban Tunj. Beras PNS	64.815.900	70.826.760	(6.010.860)	-8,49
Beban Uang Makan PNS	176.559.000	188.705.000	(12.146.000)	-6,44
Beban Tunjangan Umum PNS	20.935.000	25.100.000	(4.165.000)	-16,59
Beban Tunjangan Kemahalan	87.750.000	125.550.000	(37.800.000)	-30,11
Hakim				
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>4.628.743.790</b>	<b>6.647.311.228</b>	<b>(2.018.567.438)</b>	<b>-30,37</b>
Pengembalian Belanja	(886)	(3.166)	(2.280)	-72,02
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.628.742.904</b>	<b>6.647.308.062</b>	<b>(2.018.565.158)</b>	<b>-30,37</b>

### B.2.2. Belanja Barang

Realisasi  
Belanja  
Barang: Rp  
2.025.001.83  
9

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp2.025.001.839 dan Rp.1.126.435.020.

Realisasi Belanja Barang TA 2020 mengalami kenaikan sebesar 79,77 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2019. Hal ini disebabkan karena :

1. Adanya peningkatan aktivitas belanja barang operasional dan persediaan. Kenaikan belanja barang operasional diantaranya yaitu belanja untuk keperluan pencegahan wabah Covid-19 dimana belum dilakukan revisi DIPA untuk penambahan akun khusus belanja keperluan covid. Belanja keperluan pencegahan Covid hingga Semester I tahun 2020 sejumlah Rp6.036.500 sementara masih menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran (5211111)
2. Adanya belanja bahan kegiatan Rakerda di Triwulan pertama sebelum masa covid.
3. Adanya belanja sewa mesin fotocopy yang direalisasikan pada periode Semester I.
4. Meningkatnya aktivitas pemeliharaan Gedung dan bangunan dalam mendukung beberapa program PTA seperti ZI dan APM.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 5 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	464.023.100	363.015.596	101.007.504	27,82
Belanja Barang Persediaan	55.302.500	30.045.500	25.257.000	84,06
Belanja Barang Non Operasional	15.000.000	2.615.000	12.385.000	473,61
Belanja Jasa	795.160.023	71.624.409	723.535.614	1010,18
Belanja Pemeliharaan	507.413.788	272.831.275	234.582.513	85,98
Belanja Perjalanan Dinas	188.102.428	386.303.240	(198.200.812)	-51,31
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>2.025.001.839</b>	<b>1.126.435.020</b>	<b>898.566.819</b>	<b>79,77</b>
Pengembalian Belanja	0	0	0	0,00
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>2.025.001.839</b>	<b>1.126.435.020</b>	<b>898.566.819</b>	<b>79,77</b>

### B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi  
Belanja  
Modal :  
Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Tinggi Agama Mataram per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp. 37.405.500.

Realisasi Belanja Modal TA 2020 mengalami penurunan sebesar -100,00 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2019. Hal ini disebabkan karena belanja modal belum direalisasi hingga akhir Semester I TA 2020.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 6 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	37.405.500	-37.405.500	-100,00
Total Belanja Brutto	0	37.405.500	-37.405.500	-100,00
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	37.405.500	-37.405.500	-100,00

## C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:  
Rp 97.425.100

### Aset Lancar

#### C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di  
Bendahara  
Pengeluaran:  
Rp 50.000.000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.4.027.000 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni 2020	31 Desember TA 2019
1	Uang tunai	50.000.000	4.027.000
Jumlah		50.000.000	4.027.000

#### C.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja  
Dibayar di  
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

### C.3.Persediaan

*Persediaan:  
Rp47.425.100*

Persediaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp47.425.100 dan Rp23.949.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan 31 Desember 2019

No.	Uraian	30 Juni 2020	31 Desember 2019
1	Barang Konsumsi	29.481.600	23.520.000
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	17.943.500	429.000
<b>Total</b>		<b>47.425.100</b>	<b>23.949.000</b>

Persediaan seluruhnya berada dalam kondisi baik menurut berita acara pemeriksaan opname fisik persediaan tanggal 30 Juni 2020 nomor W22-A/788.a/PL.01/VI/2020.

### C.1. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp  
45.716.307.950*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 tersaji sebesar Rp45.716.307.950 dan Rp46.086.271.035. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 Rincian Aset Tetap  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	Perubahan
1	Tanah	38.614.442.000	38.614.442.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.920.062.840	4.920.062.840	0
3	Gedung dan Bangunan	7.676.515.000	7.676.515.000	0
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	127.598.485	127.598.485	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	51.338.618.325	51.338.618.325	0
	Akumulasi Penyusutan	-5.622.310.375	-5.252.347.290	-369.963.085
	Nilai Buku Aset Tetap	45.716.307.950	46.086.271.035	-369.963.085

#### C.14. Tanah

Tanah: Rp  
38.614.442.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.38.614.442.000 dan Rp.38.614.442.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	38.614.442.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	38.614.442.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	38.614.442.000

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah						
No.	KIB	Luas (m <sup>2</sup> )	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Nilai
1	1	375	SHP.67	Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung	Rumah Dinas	1.307.352.911
2	2	1.068	SHP.04	Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung	Rumah Dinas	3.723.341.089
3	6	3.821	SHP.05	Pemerintah RI Cq Mahkamah Agung	Gedung Kantor	33.583.748.000
	Jumlah					38.614.442.000



Saldo tanah yang tertuang dalam Laporan Keuangan per 30 Juni 2020 ini terdiri dari 1 (satu) Tanah Bangunan Kantor seluas 3.821 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Majapahit dan 2 (dua) Tanah Bangunan Rumah Dinas masing-masing seluas 375 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Majapahit dan 1.068 m<sup>2</sup> terletak di Jl. Swakarya. Tidak ada kenaikan maupun penurunan nilai Tanah. Penambahan nilai terjadi pada Tahun 2018 karena telah dilakukan revaluasi aset yaitu koreksi nilai tim penertiban aset berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Hasil Inventarisasi dan Penilaian Nomor BAR-22/WKN.14/KNL.03/2018 tanggal 15 Maret 2018.

### C.15. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan  
Mesin : Rp  
4.920.062.840*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp4.920.062.840 dan Rp4.920.062.840.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	4.920.062.840
<b>Mutasi Tambah/ Kurang</b>	
Saldo per 30 Juni 2020	4.920.062.840
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	-4.420.186.795
Nilai Buku 30 Juni 2020	499.876.045

Tidak ada penambahan maupun penurunan nilai peralatan dan mesin sampai dengan periode ini. Terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin, namun belum ada realisasi hingga Semester I berakhir dikarenakan kendala kondisi pandemi yang menghambat pengiriman barang yang sudah dipesan. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

### C.16. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan  
Bangunan : Rp  
7.676.515.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp7.676.515.000 dan Rp7.676.515.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2019	7.676.515.000
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	7.676.515.000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	-1.202.123.580
Nilai Buku 30 Juni 2020	6.474.391.420

Tidak terdapat perubahan pada nilai Gedung dan Bangunan baik penambahan maupun pengurangan. Penurunan hanya terjadi pada Tahun 2018 yang disebabkan adanya perubahan nilai akibat dari revaluasi nilai aset. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.17. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,  
Irigasi, dan  
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.18. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap  
Lainnya:  
Rp127.598.485*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.127.598.485 dan Rp.127.598.485.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2019	127.598.485
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2020	127.598.485
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2020	0
Nilai Buku 30 Juni 2020	127.598.485

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.19. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

### C.20. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp 5.622.310.375*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp5.622.310.375 dan Rp5.252.347.290.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2020 disajikan pada tabel berikut:

**Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Peralatan dan Mesin	4.920.062.840	-4.420.186.795	499.876.045
	Gedung dan Bangunan	7.676.515.000	-1.202.123.580	6.474.391.420
	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
	Aset Tetap Lainnya	127.598.485	0	127.598.485
	<b>Jumlah</b>	<b>12.724.176.325</b>	<b>-5.622.310.375</b>	<b>7.101.865.950</b>

*Aset Lainnya: Rp0*

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

**Tabel 8 Rincian Aset Lainnya**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Aset tak Berwujud	121.003.000	121.003.000
2	Aset Lain-lain	238.710.637	238.710.637
	Nilai perolehan Aset Lainnya	359.713.637	359.713.637
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	-359.713.637	-359.713.637
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

#### C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak  
Berwujud :  
Rp121.003.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp121.003.000 dan Rp121.003.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Adapun rincian ATB per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 9 Rincian Aset tak Berwujud**  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Software	121.003.000
Jumlah Total		121.003.000

Tidak terdapat perubahan nilai Aset Tak Berwujud baik mutasi tambah maupun mutasi keluar selama Semester I Tahun Anggaran 2020 bahkan selama Tahun Anggaran yang lalu. Saldo Aset Tak Berwujud senilai Rp121.003.000 merupakan software yang terpasang pada kantor Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

#### C.21. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :  
Rp 238.710.637*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp238.710.637 dan Rp238.710.637. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Tinggi Agama Mataram serta dalam proses penghapusan dari BMN. Aset yang sudah tidak digunakan terdiri dari kelompok alat kantor, alat rumah tangga, alat komunikasi, komputer unit, dan peralatan komputer, dengan total 45 unit barang

#### C.22. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi  
Penyusutan  
Aset tetap :  
Rp359.713.637*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing Rp359.713.637 dan Rp359.713.637. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019
1	Aset tak Berwujud	121.003.000	121.003.000
2	Aset Lain-lain	238.710.637	238.710.637
	Nilai perolehan Aset Lainnya	359.713.637	359.713.637
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(359.713.637)	(359.713.637)
	Nilai buku Aset Lainnya	0	0

### C.23. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka  
dari KPPN:  
Rp 50.000.000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp.50.000.000 dan Rp.4.027.000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

### C.24. Ekuitas

Ekuitas: Rp  
45.763.733.050

Ekuitas per 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45.763.733.050 dan Rp46.091.870.011. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

## D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

### D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan  
PNBP :  
Rp3.383.489

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp.3.383.489 dan Rp5.858.587. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian PNBPN per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2020	TA 2019	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.383.489	5.858.587	42,25
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
	Total Pendapatan	3.383.489	5.858.587	42,25

## D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai :*  
Rp  
4.626.540.890

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.626.540.890 dan Rp6.645.378.606. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

**Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.399.408.760	1.653.685.980	-254.277.220	-15,38
Beban Pembulatan Gaji PNS	17.197	26.236	-9.039	-34,45
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	119.068.840	140.397.580	-21.328.740	-15,19
Beban Tunj. Anak PNS	32.841.840	32.848.700	-6.860	-0,02
Beban Tunj. Struktural PNS	44.910.000	46.935.000	-2.025.000	-4,31
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.261.650.000	3.631.330.000	-1.369.680.000	-37,72
Beban Tunj. PPh PNS	418.605.239	729.976.516	-311.371.277	-42,65
Beban Tunj. Beras PNS	64.815.900	70.826.760	-6.010.860	-8,49
Beban Uang Makan PNS	176.559.000	188.705.000	-12.146.000	-6,44
Beban Tunjangan Umum PNS	20.915.000	25.100.000	-4.185.000	-16,67
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	87.750.000	125.550.000	-37.800.000	-30,11
<b>Total Belanja Brutto</b>	<b>4.626.541.776</b>	<b>6.645.381.772</b>	<b>-2.018.839.996</b>	<b>-30,38</b>
Pengembalian Belanja	-886	-3.166	2.280	-72,02
<b>Total Belanja Netto</b>	<b>4.626.540.890</b>	<b>6.645.378.606</b>	<b>-2.018.837.716</b>	<b>-30,38</b>

## D.3. Beban Persediaan

*Beban Persediaan :*  
Rp29.009.500

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp29.009.500 dan Rp29.525.000. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	29.009.500	29.525.000	-515.500	-1,75
<b>Total Beban Persediaan</b>	<b>29.009.500</b>	<b>29.525.000</b>	<b>-515.500</b>	<b>-1,75</b>

## D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :*  
*Rp1.258.906.780*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp1.258.906.780 dan Rp418.996.424. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Daya dan Jasa	55.172.180	60.039.078	-4.866.898	-8,11
Beban Jasa Pos dan Giro	5.401.500	7.070.500	-1.669.000	-23,61
Beban Keperluan Perkantoran	303.999.700	244.033.250	59.966.450	24,57
Beban Honor Operasional Satker	31.900.000	29.350.000	2.550.000	8,69
Beban Barang Operasional Lainnya	118.800.900	75.888.596	42.912.304	56,55
Beban Bahan	15.000.000	2.615.000	12.385.000	473,61
Beban Sewa	728.632.500	0	728.632.500	0,00
<b>Total Beban Barang dan Jasa</b>	<b>1.258.906.780</b>	<b>418.996.424</b>	<b>839.910.356</b>	<b>200,46</b>

## D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban Pemeliharaan:*  
*Rp510.068.788*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp510.068.788 dan Rp275.442.425. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	112.568.000	115.222.204	-2.654.204	-2,30
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	26.162.550	0	26.162.550	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	368.683.238	157.609.071	211.074.167	133,92
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	2.655.000	2.611.150	43.850	1,68
<b>Total Beban Pemeliharaan</b>	<b>510.068.788</b>	<b>275.442.425</b>	<b>234.626.363</b>	<b>85,18</b>

## D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban  
Perjalanan Dinas  
: Rp188.102.428*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp188.102.428 dan Rp386.303.240. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019**  
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	118.612.428	329.333.240	-210.720.812	-63,98
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	5.790.000	1.470.000	4.320.000	193,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	63.700.000	55.500.000	8.200.000	14,77
<b>Total Beban Perjalanan Dinas</b>	<b>188.102.428</b>	<b>386.303.240</b>	<b>-198.200.812</b>	<b>-51,31</b>

## D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang  
untuk  
Diserahkan  
kepada  
Masyarakat :  
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

## D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan  
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

## D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban  
Penyusutan dan  
Amortisasi :  
Rp369.963.085*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp369.963.085 dan Rp362.047.234. Jumlah



tersebut sudah termasuk penyesuaian atas dilakukannya Revaluasi aset atas Gedung dan Bangunan oleh Tim Inventarisasi dan Penilaian Aset. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	173.502.525	156.981.577	16.520.948	10,52
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	196.460.560	205.065.657	-8.605.097	-4,20
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>369.963.085</b>	<b>362.047.234</b>	<b>7.915.851</b>	<b>2,19</b>
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0,00
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0,00
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Beban Penyusutan dan Amortisasi</b>	<b>369.963.085</b>	<b>362.047.234</b>	<b>7.915.851</b>	<b>2,19</b>

## D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban  
Penyisihan  
Piutang tak  
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

## D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain  
: Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

## D.12. Kegiatan Non Operasional

*Kegiatan Non  
Operasional :  
Rp(161.900)*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang

tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Pendapatan dan Beban Non operasional untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional  
per 30 Juni TA 2020 dan TA 2019  
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2020	TA 2019	Naik(Turun)	%
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	150	-150	-100,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	156.100	12.500	143.600	1.148,80
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	-318.000	-8.000	-310.000	3.875,00
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	-161.900	4.650	-166.550	-3.581,72

### D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp.

## E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

### E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp46.091.870.011 dan Rp46.900.232.791.

### E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp(6.979.369.882) dan Rp(8.111.829.692). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

## **E.3. Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas**

### **E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset**

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

### **E.3.2. Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **E.3.3. Selisih Revaluasi Aset Tetap**

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

### **E.3.4. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

### **E.3.5. Koreksi Lain-lain**

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir 30 Juni 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

## E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.651.232.921 dan Rp7.807.207.512.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas  
per 30 Juni TA 2020  
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-2.511.822
Ditagihkan ke Entitas Lain	6.653.744.743
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
<b>Jumlah</b>	<b>6.651.232.921</b>

### E.4.1. Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2020, DDEL sebesar Rp2.511.822 sedangkan DKEL sebesar Rp6.653.744.743.

### E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/ Transfer Keluar merupakan perpindahan asset/ kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL, dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0, sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp0.

### E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020, sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2020.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2020 adalah Rp0.

## **E.5. Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp45.763.733.050 dan Rp46.595.610.611.

## **F. Pengungkapan Penting Lainnya**

### **F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca**

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

### **F.2. Pengungkapan Lain-lain**

#### **F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK**

Tidak terdapat temuan BPK baik untuk Tahun Anggaran 2020 maupun Tahun Anggaran yang lalu, sehingga tidak ada informasi yang layak untuk ditampilkan pada bagian Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

#### **F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual**

Tidak terdapat Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual yang dapat disampaikan pada Laporan Keuangan ini.

#### **F.2.3. Rekening Pemerintah**

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Tinggi Agama Mataram adalah:

1. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-000096-30-1 a.n. BPG 038 PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0.

2. BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001040-30-3 a.n. Bendahara Pengeluaran Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILAG dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp.0.
3. Bank BRI Cabang Mataram A/C 0052-01-001217-30-8 a.n. RPL 038 PTA Mataram Utk PDT Bya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2020 sebesar Rp1.372.129.

#### F.2.4. Revisi DIPA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan 2 (dua) kali Revisi DIPA yaitu

1. Revisi 1 tanggal 13 Februari 2020 yaitu penyesuaian nama pejabat dan RPD.
2. Revisi 2 tanggal 29 April 2020 yaitu pengurangan pagu belanja perjalanan dinas.

#### F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Pengadilan Tinggi Agama Mataram selama Semester I Tahun Anggaran 2020 beberapa kali melakukan Ralat SPM antara lain dilakukan pada:

1. SPM Nomor 17 tanggal 27 Januari; kesalahan kode belanja pemeliharaan peralatan mesin
2. SPM Nomor 29 tanggal 12 Februari; kesalahan kode belanja pemeliharaan peralatan mesin
3. SPM Nomor 34 tanggal 25 Februari; kesalahan kode belanja pemeliharaan peralatan mesin
4. SPM Nomor **12** tanggal 21 Januari; kesalahan kode belanja sewa rumah dinas hakim
5. SPM Nomor 15 tanggal 24 Januari; kesalahan kode output, akun, dan komponen beberapa belanja perjalanan dinas, belanja operasional, dan belanja bahan.
6. SPM Nomor **41** tanggal 04 Maret; kesalahan kode belanja perjalanan dinas.
7. SPM Nomor 98 tanggal 18 Mei; kesalahan kode belanja listrik.
8. SPM Nomor 69 tanggal 09 April; perubahan akun baru belanja keperluan covid
9. SPM Nomor 98 tanggal 18 Mei; perubahan akun baru belanja keperluan covid
- 10.SPM Nomor 141 tanggal 24 Agustus; perubahan akun baru belanja keperluan covid.

#### F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak terdapat informasi lain yang layak untuk dituangkan pada Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020 ini.

# *DAFTAR DAN LAMPIRAN*

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,  
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN  
NILAI BUKU ASET TETAP*



Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2020	Per 30 Juni 2020	Per 30 Juni 2020
<b>A.</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>4.920.062.840</b>	<b>4.246.684.270</b>	<b>173.502.525</b>	<b>0</b>	<b>499.695.845</b>
1	Alat Bantu	7	393.240.000	252.797.143	28.088.571	0	112.354.286
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	1.714.609.412	1.696.409.412	18.200.000	0	0
	Alat Ukur	5	625.000	625.000	0	0	0
	Alat Kantor	5	495.502.925	425.009.613	15.111.092	0	55.382.220
	Alat Rumah Tangga	5	1.282.356.328	1.156.575.818	38.489.160	0	87.291.350
	Alat Studio	5	113.816.000	71.711.600	5.631.600	0	36.472.800
	Alat Komunikasi	5	36.228.000	25.997.997	3.409.993	0	6.820.010
	Komputer Unit	4	690.739.620	461.066.177	52.315.827	0	177.357.616
	Peralatan Komputer	4	192.765.355	156.491.510	12.256.282	0	24.017.563
10	Tanda Penghargaan Bidang Olah Raga	-	180.200	0	0	0	180.200
<b>B.</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>7.676.515.000</b>	<b>1.005.663.020</b>	<b>196.460.560</b>	<b>0</b>	<b>6.474.391.420</b>

	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.405.317.000	903.827.781	176.829.808	0	5.324.659.411
	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	1.109.845.000	91.851.231	17.690.124	0	1.000.303.645
	Tugu/tanda Batas	50	161.353.000	9.984.008	1.940.628	0	149.428.364
<b>C.</b>	<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>						
<b>D.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		127.598.485	0	0	0	127.598.485
	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	127.598.485	0	0	0	127.598.485
	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	0	0	0	-	0
<b>E.</b>	<b>Aset Tetap yang Tidak Digunakan</b>		238.710.637	238.710.637	0	0	0
	Alat kantor	-	39.765.000	39.765.000	0	0	0
	Alat rumah tangga		30.743.000	30.743.000	0	0	0
	Alat komunikasi		27.000	27.000	0	0	0
	Komputer unit		150.895.637	150.895.637	0	0	0
	Peralatan kantor		17.280.000	17.280.000	0	0	0
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		12.835.288.477	5.491.057.927	369.963.085	0	6.974.267.465
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya		12.962.886.962	5.491.057.927	369.963.085	0	7.101.865.950

## *B. Daftar Hibah Langsung*

**Pengadilan Tinggi Agama Mataram**  
**Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa**  
**untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2020**

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
		U					
	NIHIL		NIHIL				
	Jumlah :						

## *C. Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan*

**RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2020**

NO	URAIAN	LOKASI	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	PERSentase Pengerjaan	NILAI PEKERJAAN	KETERANGAN
	NIHIL						